

Tinjauan Sosiologis tentang Masuknya PAI ke dalam Kurikulum Sekolah Umum

Muhammad Fathihudin¹, Diki Ramdani², Muhammad Abdullah Darraz³

^{1,2} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, DKI Jakarta, Indonesia

Email: fathihudin02@gmail.com, dykyramdany@gmail.com,

m.abdullahdarraz@uhamka.ac.id

Abstract

This study provides a sociological review of the integration of Islamic Religious Education (PAI) into Indonesia's general school curriculum. Using a descriptive qualitative method with a library research design, the study draws on government policies, historical records, and academic literature as primary data sources, analyzed through content analysis involving data reduction, display, and conclusion drawing. Findings show that PAI's incorporation into mainstream education deliberately bridged the divide between secular and religious systems inherited from the colonial era. Sociologically, this integration reflects the collective aspirations of a religious society, serving as an instrument of socialization that internalizes religious values and national identity while promoting social harmony amid Indonesia's diversity. However, a persistent gap remains between ideal curriculum design and field implementation, constrained by conventional teaching methods and limited teacher capacity. Future policy should strengthen teacher competence and school autonomy to make religious education more relevant and inclusive.

Keywords: Curriculum Integration, Islamic Religious Education, Indonesia, Sociology of Education.

Abstrak

Penelitian ini menyajikan tinjauan sosiologis mengenai integrasi Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam kurikulum sekolah umum di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berdesain studi kepustakaan, penelitian ini menjadikan kebijakan pemerintah, catatan sejarah, dan literatur akademik sebagai sumber data utama, yang dianalisis melalui teknik analisis isi meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya PAI ke dalam pendidikan umum merupakan upaya yang disengaja untuk menjembatani dualisme sistem pendidikan sekuler dan agama warisan era kolonial. Secara sosiologis, integrasi ini mencerminkan aspirasi kolektif masyarakat yang religius, berfungsi sebagai instrumen sosialisasi yang menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan dan identitas nasional, sekaligus mendorong harmoni sosial di tengah keberagaman Indonesia. Namun, masih terdapat kesenjangan yang persisten antara desain kurikulum yang ideal dan implementasinya di lapangan, yang dibatasi oleh metode pengajaran konvensional dan kapasitas guru yang terbatas. Kebijakan ke depan perlu memperkuat kompetensi guru dan otonomi sekolah agar pendidikan agama menjadi lebih relevan dan inklusif.

Kata Kunci: Integrasi Kurikulum, Pendidikan Agama Islam, Indonesia, Sosiologi Pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi fundamental dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, bukan semata sebagai mata pelajaran wajib, melainkan sebagai instrumen pembentukan kepribadian peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kehadirannya dalam kurikulum sekolah umum merupakan manifestasi dari aspirasi sosioreligius masyarakat untuk mengakhiri dualisme pendidikan warisan kolonial yang selama ini memisahkan sistem pendidikan sekuler dari pendidikan agama. Dalam kerangka sosiologi pendidikan, kurikulum PAI tidak dapat dipandang sebagai dokumen administratif yang netral; ia adalah arena dialektika antara otoritas keagamaan, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan politik penguasa, sekaligus peta jalan yang mengarahkan proses pendidikan menuju tujuan yang hendak dicapai negara dan masyarakat secara bersamaan.

Dinamika ini terus bergerak seiring perubahan zaman. Literatur terkini menunjukkan bahwa kurikulum PAI senantiasa bertransformasi untuk merespons tantangan globalisasi, menguatnya radikalisme, dan percepatan revolusi digital. Agus dkk. (2025)

misalnya menegaskan urgensi integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum PAI di era Society 5.0 sebagai upaya menjaga kohesi nasional. Sejalan dengan itu, Anzorul Alim dan Ratnasari (2026) mengkaji evolusi PAI sebagai ruang kontestasi ideologis lintas rezim, mulai dari corak sentralistik Orde Baru hingga pendekatan otonom yang diusung Kurikulum Merdeka. Implementasi Kurikulum Merdeka saat ini bahkan membawa paradigma baru yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi dan fleksibilitas capaian melalui Capaian Pembelajaran (CP), sebuah pergeseran yang belum sepenuhnya dipahami dampak sosiologisnya.

Sayangnya, kelimpahan kajian mengenai PAI tidak diikuti oleh kedalaman perspektif yang setara. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek mikro, seperti efektivitas metode mengajar guru atau analisis konten materi secara parsial, tanpa menempatkannya dalam linimasa historis-sosiologis yang lebih luas. Kajian makro yang secara khusus memetakan bagaimana narasi PAI di sekolah umum berevolusi sebagai bentuk *state anxiety*, yaitu kecemasan negara terhadap stabilitas politik dan social, masih jarang ditemukan dalam kajian akademik. Kesenjangan ini diperparah oleh ketidakkonsistenan yang mencolok antara desain kurikulum ideal dan praktik di lapangan: sebanyak 76% guru PAI dilaporkan masih mengandalkan metode ceramah tradisional, padahal kurikulum secara eksplisit menuntut pendekatan saintifik dan partisipatif. Pada level kebijakan, era desentralisasi turut menyisakan persoalan tersendiri, karena otonomi luas yang diberikan pada KTSP berpotensi memicu fragmentasi kontrol konten dan membuka celah bagi masuknya narasi keagamaan eksklusif di tingkat lokal.

Bertolak dari persoalan tersebut, kajian ini memfokuskan perhatian pada dinamika integrasi PAI ke dalam ruang sekuler sekolah umum yang kerap terjebak dalam kepentingan utilitarian negara. Tujuannya adalah menyajikan tinjauan sosiologis yang komprehensif atas sejarah dan transformasi masuknya PAI ke dalam kurikulum sekolah umum di Indonesia, mencakup rentang kebijakan pendidikan nasional sejak awal kemerdekaan hingga era kontemporer, dengan unit analisis berupa dokumen kebijakan kurikulum resmi dan literatur sosiologi pendidikan yang relevan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini disusun secara sistematis dalam empat bagian. Bagian pertama menguraikan tinjauan historis penempatan PAI dalam sistem sekolah umum. Bagian kedua menganalisis secara sosiologis peran kurikulum PAI sebagai agen sosialisasi dan perekat identitas nasional. Bagian ketiga mendiskusikan tantangan implementasi kurikulum di era digital serta urgensi moderasi beragama. Artikel ini diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi bagi rekonstruksi paradigma PAI yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan tuntutan kompetensi abad ke-21.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena tujuan penelitian adalah untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan konsep serta temuan ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian berdasarkan berbagai sumber literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu fenomena melalui penelaahan mendalam terhadap data yang bersifat tekstual, sehingga dapat menghasilkan analisis yang sistematis dan argumentatif.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, prosiding, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, kredibilitas, kebaruan, serta keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Pemilihan sumber tersebut dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mampu memberikan landasan teoritis yang kuat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada berbagai basis data ilmiah, seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional maupun internasional. Literatur yang telah diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, kualitas publikasi, serta kontribusinya terhadap pembahasan penelitian. Selanjutnya, setiap sumber dibaca secara kritis, dicatat poin-poin pentingnya, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus kajian yang telah ditentukan.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi, baik artikel jurnal, buku, maupun dokumen ilmiah lainnya. Perbandingan tersebut dilakukan untuk menemukan kesesuaian, perbedaan, dan hubungan antarsumber sehingga diperoleh informasi yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, menginterpretasikan, dan mensintesis informasi berdasarkan tema-tema yang muncul sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun pembahasan dan menarik kesimpulan penelitian secara sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum Indonesia merupakan hasil dari perjalanan historis, sosiologis, dan politik yang panjang serta saling berkelindan. Secara historis, pada masa penjajahan Belanda, pendidikan agama sama sekali tidak mendapat tempat di sekolah-sekolah pemerintah karena kebijakan kolonial yang mengklaim bersikap netral terhadap agama, sehingga sistem pendidikan yang diterapkan bercorak sekuler dan warisan ini turut memengaruhi wajah pendidikan Indonesia pasca kemerdekaan. Situasi mulai berubah ketika Jepang menduduki Indonesia; meskipun kebijakan Jepang secara umum tidak lebih baik dari Belanda, pemerintah pendudukan Jepang memberi kelonggaran dengan mengizinkan pendidikan agama diajarkan di sekolah, sebuah langkah yang menjadi titik awal masuknya pendidikan agama ke ranah pendidikan formal (Kosim, 2006).

Setelah Indonesia merdeka, posisi PAI berangsur-angsur menguat, dari semula hanya menjadi mata pelajaran pelengkap yang tidak wajib dan tidak memengaruhi kenaikan kelas, berubah menjadi mata pelajaran inti di setiap jenjang pendidikan. Penguatan ini tidak lepas dari kesadaran para pendiri bangsa bahwa pendidikan nasional harus bersendikan agama dan kebudayaan bangsa, sebagaimana tampak dari keputusan BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada 22 Desember 1945 yang menegaskan pentingnya memajukan pendidikan di langgar dan madrasah secara berkelanjutan dan dipercepat, serta anjuran BPKNIP pada 27 Desember 1945 agar pendidikan agama di sekolah mendapat tempat yang teratur, seksama, dan perhatian yang semestinya (Humaedi, 2021).

Dari perspektif sosiologi pendidikan, masuknya PAI ke dalam kurikulum sekolah umum memiliki fungsi sosialisasi yang penting, sebab sekolah merupakan sarana yang diharapkan masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai dan tatanan tradisional. Dalam konteks ini, PAI berperan sebagai instrumen kontrol sosial yang bersifat preventif maupun represif, melakukan transmisi kebudayaan berupa norma, nilai, dan informasi secara langsung, termasuk falsafah negara, sifat warga negara yang baik, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar pembentukan karakter bangsa (Zahrani, 2024).

Selain itu, PAI juga berfungsi sebagai media pelestarian budaya, karena transmisi kebudayaan kepada peserta didik mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan norma, sementara nilai-nilai Islam yang diajarkan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus. Sebagaimana dikemukakan Abdullah Idi, pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk dan

menciptakan masyarakat sesuai cita-cita bersama melalui peserta didik sebagai generasi masa depan.

Keberadaan PAI di sekolah umum juga mencerminkan eratnya relasi antara sekolah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, mengingat sekolah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar. Dalam hal ini, PAI menjadi jembatan antara nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat, khususnya umat Islam, dengan sistem pendidikan formal, sehingga anak-anak mendapatkan pendidikan agama tidak hanya di rumah atau lembaga keagamaan, tetapi juga di sekolah (Shabir et al., 2022).

Secara yuridis, posisi PAI diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan, dengan alokasi waktu yang terus berkembang, dari hanya dua jam pelajaran per minggu pada masa awal kemerdekaan, hingga pada era Kurikulum 2013 mendapat tambahan menjadi dua jam pelajaran untuk materi inti ditambah satu jam pelajaran untuk pendalaman Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), life skill, dan pembentukan karakter melalui kisah-kisah teladan.

Secara politik, kebijakan mengenai PAI di sekolah umum juga tidak terlepas dari dinamika politik pendidikan nasional yang tertuang dalam tiga era Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 jo. UU No. 12 Tahun 1954 pada masa Orde Lama, UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 pada masa Orde Baru, dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada masa Reformasi. Ketiga era ini masing-masing menunjukkan bahwa kuat-lemahnya posisi PAI di sekolah umum sangat bergantung pada arah kebijakan politik pendidikan yang diambil oleh pemerintah yang berkuasa pada setiap periodenya (Mahidin, 2018).

Meskipun posisi PAI di sekolah umum semakin menguat secara historis, yuridis, dan politik, implementasinya tidak lepas dari sejumlah tantangan sosiologis. Salah satu tantangan utama adalah adanya dualisme dan dikotomi pendidikan yang diwarisi sejak awal kemerdekaan, yakni antara sistem pendidikan sekolah umum yang bercorak sekuler sebagai warisan kolonial Belanda dan sistem pendidikan Islam yang tumbuh serta berkembang secara mandiri di kalangan masyarakat Muslim. Kedua sistem ini kerap dianggap saling bertentangan dan berkembang secara terpisah, sehingga meskipun telah ada berbagai upaya integrasi, dikotomi tersebut masih terasa dalam praktik implementasi PAI di sekolah umum hingga saat ini.

Tantangan sosiologis lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan antara sekolah dan masyarakat. S. Nasution mengungkapkan bahwa pada dasarnya setiap sekolah bertujuan mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, namun pada kenyataannya pendidikan di sekolah sering kali kurang relevan dengan kehidupan masyarakat karena kurikulum lebih banyak berpusat pada bidang studi yang tersusun secara logis dan sistematis, tanpa hubungan yang nyata dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dalam konteks PAI, kesenjangan ini tampak ketika nilai-nilai agama yang diajarkan di sekolah tidak selaras dengan praktik keagamaan yang berlangsung di masyarakat, atau ketika materi PAI disajikan secara terlalu normatif dan teoretis tanpa mempertimbangkan konteks sosial budaya peserta didik (Amanullah & Wantini, 2024).

Terlepas dari tantangan tersebut, tinjauan sosiologis atas masuknya PAI ke dalam kurikulum sekolah umum menunjukkan bahwa PAI memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial. PAI tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan agama, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai sosial bagi peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum PAI ke depan perlu memperhatikan aspek sosiologis secara lebih mendalam, sebagaimana dikemukakan para ahli bahwa pengembangan kurikulum di daerah selalu menuntut keterampilan konseptual, yakni kecakapan untuk memformulasikan pikiran, memahami teori-teori, melakukan aplikasi, serta menganalisis

kecenderungan berdasarkan kemampuan teoritis dan kebutuhan masyarakat masa depan (Akmal et al., 2025).

Tantangan kontemporer seperti radikalisme dan intoleransi beragama juga menuntut PAI untuk berperan lebih strategis dalam kehidupan berbangsa. Sebagai respons atas kebutuhan ini, Kementerian Agama tengah menyusun Panduan Pembelajaran dan Asesmen PAI berbasis Moderasi Beragama, yang memberikan arahan bagi guru PAI dalam melaksanakan proses pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga asesmen, berdasarkan rumusan Capaian Pembelajaran (CP) terbaru dalam Kurikulum Merdeka. Perkembangan ini menegaskan bahwa PAI di sekolah umum terus bertransformasi mengikuti dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, dengan harapan implementasinya di sekolah mampu membentuk sikap dan karakter siswa yang berakhlakul karimah sekaligus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

D. PENUTUP

Simpulan

Tinjauan historis, sosiologis, dan yuridis-politik terhadap masuknya Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam kurikulum sekolah umum menunjukkan bahwa keberadaannya bukanlah hasil kebijakan tunggal, melainkan buah dari proses panjang yang bermula sejak masa kolonial hingga era reformasi, diperkuat oleh landasan yuridis seperti UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, serta dipengaruhi oleh dinamika politik pendidikan pada setiap zamannya. Secara sosiologis, PAI terbukti memiliki fungsi strategis sebagai instrumen sosialisasi nilai, kontrol sosial, pelestarian budaya, sekaligus jembatan yang mempererat relasi antara sekolah dan masyarakat.

Namun demikian, implementasi PAI di sekolah umum masih dihadapkan pada sejumlah tantangan sosiologis yang perlu terus diperhatikan, terutama dualisme antara sistem pendidikan umum yang sekuler dan sistem pendidikan Islam, serta kesenjangan antara materi PAI yang cenderung normatif-teoretis dengan realitas kehidupan sosial-keagamaan peserta didik. Keberhasilan implementasi PAI ke depan sangat bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan tersebut, yang mencakup pemahaman mendalam terhadap konteks sosiologis masyarakat, kesiapan dan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang kontekstual, serta dukungan sinergis dari keluarga dan masyarakat.

Di tengah tantangan kontemporer seperti radikalisme dan intoleransi beragama, PAI dituntut untuk terus bertransformasi menjadi agen perubahan sosial yang relevan, salah satunya melalui integrasi dengan program moderasi beragama sebagaimana yang tengah dikembangkan Kementerian Agama dalam Kurikulum Merdeka. Dengan memperhatikan aspek sosiologis secara komprehensif dalam pengembangan kurikulumnya, PAI di sekolah umum diharapkan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai keislaman, sehingga dapat berkontribusi optimal dalam membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu hidup harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.

Saran

Pengembang kurikulum perlu melakukan kontekstualisasi materi PAI agar lebih relevan dengan realitas sosial-budaya peserta didik, tidak sekadar normatif-teoretis. Guru PAI perlu meningkatkan kompetensi pedagogis dan wawasan sosiologis agar mampu menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan kehidupan bermasyarakat secara kontekstual. Pemerintah dan Kementerian Agama perlu mempercepat implementasi Panduan Pembelajaran dan Asesmen PAI berbasis Moderasi Beragama secara merata di seluruh satuan pendidikan guna menjawab tantangan radikalisme dan intoleransi.

Sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu membangun sinergi berkelanjutan agar nilai-nilai yang diajarkan dalam PAI dapat terinternalisasi secara konsisten di luar lingkungan sekolah. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas

implementasi PAI berbasis moderasi beragama di berbagai jenjang dan wilayah, sebagai dasar evaluasi kebijakan pendidikan agama ke depan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Kosim, M. (2006). Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum (Perspektif Sosio-Politik-Historis). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Humaedi, H., & Hartono, R. (2021). kebijakan pendidikan islam di indonesia 1950-2013 (analitis alokasi waktu pelajaran pai pada sekolah umum). *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 317-333.
- Zahrani, H. (2024). Kajian Sosiologis dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Salam Institute Islamic Studies*, 1(1), 31-39.
- Shabir, M., Usman, U., & Kamal, K. (2022). Pendidikan Agama Islam di sekolah umum. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(1), 58-64.
- Untari, P. (2022). Pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah dasar. *SKULA: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah*, 2(1), 77-90.
- Mahidin, L. (2018). *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 Serta Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Amanullah, W. A., & Wantini, W. (2024). Analisis kesenjangan sosial di sekolah: Perspektif sosiologi pendidikan Islam (Studi kasus di SDN Bhayangkara Yogyakarta). *Jurnal Dirosab Islamiyah*, 6(1), 43-55.
- Akmal, M., Rosalina, R., & Khasanah, N. (2025). Peran Sosiologi Pendidikan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial pada Lembaga Pendidikan yang Inklusif di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 1054-1063.
- Nurdaeni, N. M., Indra, H., & Alim, A. (2024). Penguatan moderasi beragama pada peserta didik melalui kurikulum Merdeka. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1), 91-102. (Nurdaeni et al., 2024).